Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DI DESA PATEGALAN KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO

Mardiatul Magfiroh[1] , Baktiawan Nusanto,M.Si[2]
[12] Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

firaamaghfiroh255@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A C T

Village development is one of the strategic instruments for achieving equitable community welfare. Through various village development policies, the government seeks to improve infrastructure quality, strengthen community empowerment, and stimulate local economic growth. This study aims to examine the implementation of village development policies from an economic perspective in Pategalan Village, Jatibanteng District, Situbondo Regency. The research employed a qualitative method with a case study approach to gain an in-depth understanding of the phenomenon under investigation. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving village officials, community members, and local business actors. The findings indicate that the implementation of village development policies has contributed positively to improving infrastructure accessibility, supporting the growth of community-based micro-enterprises, and increasing residents' income levels. However, several challenges remain, including limited human resource capacity, low community participation in development planning, and the underutilization of the village's economic potential. Therefore, efforts to strengthen the capacity of village officials and enhance community participation are necessary to promote sustainable rural economic development.

***Keywords**: Public Policy, Village Development, Rural Economy, Policy Implementation, Situbondo.*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda prioritas dalam pembangunan nasional Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, menyusun perencanaan pembangunan, serta mengatur penggunaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa. Kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.[1]

Pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan alokasi Dana Desa sebagai instrumen percepatan pembangunan pedesaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, total Dana Desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 mencapai lebih dari Rp610 triliun dan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah pedesaan.[2] Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Dalam perspektif ekonomi, pembangunan desa tidak hanya diukur melalui keberhasilan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya, tetapi juga melalui peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan usaha mikro dan kecil, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta terbukanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat desa. Menurut Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.[3] Oleh karena itu, implementasi kebijakan pembangunan desa perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

[1] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
[2] *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa Tahun 2024 (Jakarta: Kemenkeu RI, 2024).*
[3] *Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Economic Development, 13th Edition (New York: Pearson Education, 2020), hlm. 15–18.*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

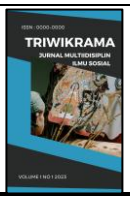


Desa Pategalan yang terletak di Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sebagian besar masyarakat Desa Pategalan menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan kecil, dan usaha mikro. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa, pembangunan saluran irigasi, pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, serta peningkatan fasilitas pelayanan publik. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kegiatan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan, efektivitas implementasi kebijakan pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sering kali dipengaruhi oleh faktor kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.[4] Di sisi lain, masih terdapat desa yang mengalami berbagai kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa.[5]

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian berfokus pada aspek tata kelola Dana Desa, akuntabilitas keuangan, dan pembangunan infrastruktur. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan pembangunan desa dari perspektif ekonomi pada tingkat desa, khususnya di Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran empiris mengenai dampak implementasi kebijakan pembangunan desa terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

[4] *Rahayu, E., & Susanto, D., "Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Desa," Jurnal Governance, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 15–29.*
[5] *Handayani, S., & Rahmawati, N., "Analisis Efektivitas Pembangunan Desa Berbasis Dana Desa," Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 45–58.*
*Corresponding author
E-mail addresses: firaamaghfiroh255@gmail.com



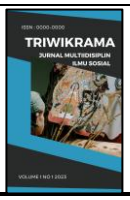
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan desa dalam perspektif ekonomi di Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pembangunan desa dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pembangunan desa serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dialami individu maupun kelompok.[6] Lokasi penelitian berada di Desa Pategalan, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Desa Pategalan merupakan salah satu desa yang melaksanakan berbagai program pembangunan melalui pemanfaatan Dana Desa dan memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, terutama pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan usaha mikro masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, dan masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa, laporan penggunaan Dana Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

[6] *John W. Creswell & Cheryl N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (California: Sage Publications, 2018), hlm. 43.*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Pategalan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses implementasi kebijakan pembangunan desa, faktor pendukung, faktor penghambat, serta dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.[7] Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai objek penelitian.[8]

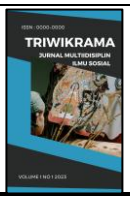
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan temuan penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah.[9] Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji tingkat validitas dan kredibilitasnya sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dinamika Implementasi Kebijakan Publik

[7] *Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104–115.*
[8] *Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 224.*
[9] *Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Fourth Edition (California: Sage Publications, 2020), hlm. 7–12.*

*Corresponding author
E-mail addresses: firaamaghfiroh255@gmail.com



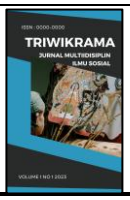
Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi menerjemahkan keputusan pemerintah ke dalam tindakan nyata. Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan di lapangan.[10]Perkembangan kajian implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam program yang dapat diterima masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, implementasi kebijakan menjadi semakin penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri.[11]Dinamika implementasi kebijakan pembangunan desa di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan pembangunan yang bersifat top-down menuju pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masyarakat desa.[12]

2. Konsep Pembangunan Desa dalam Perspektif Ekonomi

Pembangunan desa merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi, pembangunan desa tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pembangunan tersebut dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan usaha ekonomi produktif. Menurut Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.[13] Saat ini pembangunan desa diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pengembangan UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sektor pertanian, peternakan, serta

[10] *George C. Edward III, Implementing Public Policy (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10.*
[11] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
[12] *Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 145.*
[13] *Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Economic Development, 13th Edition (New York: Pearson, 2020), hlm. 15.*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ekonomi kreatif. Pendekatan ini menjadi penting karena mayoritas penduduk desa masih bergantung pada sektor primer sebagai sumber mata pencaharian utama.

3. Dinamika Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan ekonomi desa merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Todaro dan Smith, pembangunan ekonomi ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan perubahan struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif.[14] Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengelola pembangunan melalui dukungan Dana Desa. Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pada tahun anggaran 2025, pemerintah menetapkan pagu Dana Desa nasional sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, digitalisasi desa, dan pembangunan berbasis padat karya tunai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks Kabupaten Situbondo, Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan pedesaan. Alokasi Dana Desa tahun 2025 untuk Kabupaten Situbondo mencapai sekitar Rp144 miliar yang disalurkan kepada desa-desa penerima di wilayah kabupaten tersebut. Salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa adalah Desa Pategalan, Kecamatan Jatibanteng, dengan nilai alokasi sekitar Rp941.250.000. [15]Besarnya alokasi tersebut menunjukkan adanya peluang bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan,

[14] *Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa Tahun 2024.*
[15] *Dana Desa Kabupaten Situbondo 2025 Dianggarkan untuk 189 Desa dengan Total Dana Rp144 Miliar," RBTV Disway, diakses 24 Juni 2026*

*Corresponding author
E-mail addresses: firaamaghfiroh255@gmail.com



pengembangan usaha produktif, dan pembangunan sarana pendukung kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pembangunan desa perlu dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Pategalan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Gambaran Umum Desa Pategalan

Desa Pategalan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, terutama pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Selain sektor pertanian, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai peternak, pedagang, buruh tani, dan pelaku usaha mikro. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian masyarakat Desa Pategalan masih didominasi oleh sektor primer yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Situbondo, Desa Pategalan turut menerima alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2025, Desa Pategalan memperoleh alokasi Dana Desa sebesar kurang lebih Rp941.250.000 yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Desa Pategalan berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan sarana dan prasarana umum, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

2. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa di Desa Pategalan

Implementasi kebijakan pembangunan desa merupakan proses pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

masyarakat. Di Desa Pategalan, implementasi pembangunan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Tahap perencanaan pembangunan diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan program yang dianggap penting bagi kemajuan desa. Hasil musyawarah kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa merealisasikan berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan. Program tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan desa, pembangunan saluran irigasi, perbaikan fasilitas umum, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa

3. Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Berdasarkan Perspektif Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pembangunan desa di Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dapat dipahami melalui pendekatan implementasi kebijakan publik yang menekankan pentingnya proses pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam berbagai program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Pategalan berupaya membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, sosialisasi program pembangunan, dan penyampaian informasi terkait penggunaan Dana Desa. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi sarana untuk menyampaikan tujuan pembangunan

*Corresponding author
E-mail addresses: firaamaghfiroh255@gmail.com



sekaligus menampung aspirasi masyarakat.[16]Melalui proses tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

Selain komunikasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut tidak hanya berupa anggaran yang berasal dari Dana Desa, tetapi juga mencakup kualitas aparatur desa, sarana pendukung, serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah memberikan kesempatan bagi Desa Pategalan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan anggaran tetap memerlukan kemampuan manajerial dan administratif yang baik agar setiap program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.[17]

Faktor lain yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen tersebut tercermin dari kesungguhan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparatur desa yang memiliki dedikasi tinggi cenderung lebih mampu mengelola program pembangunan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

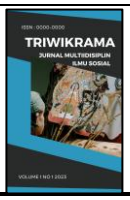
4. Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan pembangunan desa di Desa Pategalan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai perubahan yang terjadi sebagai hasil dari program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Salah satu perubahan yang paling nyata adalah meningkatnya kualitas sarana dan prasarana desa yang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas serta memperlancar proses distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat ke berbagai tujuan pemasaran. Kondisi tersebut secara tidak langsung mampu

[16] *George C. Edward III, Implementing Public Policy (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10.*

[17] *Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 145–147.*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



menekan biaya transportasi, mempercepat waktu distribusi, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan akses jalan yang lebih baik, masyarakat juga menjadi lebih mudah menjangkau pusat perdagangan, layanan publik, maupun fasilitas pendukung lainnya. Di samping pembangunan jalan, peningkatan sarana irigasi juga memberikan manfaat yang cukup besar bagi sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat Desa Pategalan. Sistem irigasi yang berfungsi dengan baik mampu mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat. Peningkatan hasil produksi pertanian tersebut berpotensi memberikan tambahan pendapatan bagi petani dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat desa. Kebijakan pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Program-program tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha produktif, serta pendampingan kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha maupun menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan.

Pada kondisi ini, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan manfaat berupa tersedianya infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan produktivitas, serta perluasan peluang usaha di tingkat desa.[18]

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa

Keberhasilan pembangunan desa didukung oleh adanya landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi desa dalam merencanakan, melaksanakan,

[18] *Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Economic Development, 13th Edition (New York: Pearson Education, 2020), hlm. 15–18.*

*Corresponding author
E-mail addresses: firaamaghfiroh255@gmail.com

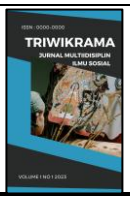


serta mengevaluasi berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dukungan regulasi, ketersediaan Dana Desa juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Dana Desa memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan sumber pembiayaan yang memadai memungkinkan program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Pategalan, khususnya pada sektor pertanian, turut menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian mayoritas masyarakat, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengembangkan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan dapat membantu menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan pendamping desa turut membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan melalui pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pengelolaan program pembangunan desa.

Meskipun memiliki berbagai faktor pendukung, pelaksanaan pembangunan desa masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek pengelolaan administrasi, perencanaan program, dan pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program pembangunan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi aparatur desa. Tantangan lainnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Tidak seluruh kelompok masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa, baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan. Akibatnya, masih terdapat aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi secara maksimal dalam program pembangunan yang dilaksanakan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dari sisi ekonomi, ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan. Ketergantungan tersebut menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan cuaca, serangan hama, maupun fluktuasi harga komoditas pertanian di pasar. Situasi ini dapat berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pengembangan potensi ekonomi lokal masih menghadapi kendala berupa terbatasnya inovasi dan diversifikasi usaha masyarakat. Pemanfaatan potensi desa yang belum optimal dapat mengurangi peluang terciptanya sumber pendapatan baru yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengembangkan inovasi ekonomi berbasis potensi lokal agar pembangunan desa dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.[19]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa di Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan fisik maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang didukung melalui Dana Desa memungkinkan pemerintah desa merealisasikan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi oleh komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana kebijakan, serta efektivitas struktur birokrasi desa. Musyawarah desa menjadi instrumen penting dalam menjaring aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, keberadaan Dana Desa memberikan dukungan finansial yang memungkinkan berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan saluran irigasi memberikan dampak positif terhadap kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar, serta mengurangi biaya transportasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang sebagian besar

[19] *Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Economic Development, 13th Edition (New York: Pearson Education, 2020), hlm. 15–20.*

*Corresponding author
E-mail addresses: firaamaghfiroh255@gmail.com

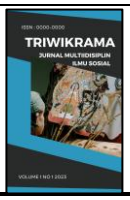
menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan usaha mikro. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan desa masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan desa di Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan didukung oleh komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, ketersediaan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan, serta adanya koordinasi antar lembaga desa dalam menjalankan program pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur desa, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, kelancaran distribusi hasil pertanian, dan penguatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi lokal agar tujuan pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan. Hanya saja Pemerintah Desa Pategalan perlu meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, peningkatan transparansi pengelolaan Dana Desa, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus didorong agar pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak



Baktiawan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan jurnal ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pategalan, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi, bantuan, dan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan semua pihak yang telah memberikan doa serta motivasi.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam kajian kebijakan pembangunan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W., & Poth, Cheryl N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publications.

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Handayani, S., & Rahmawati, N. (2022). Analisis Efektivitas Pembangunan Desa Berbasis Dana Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 45–58.

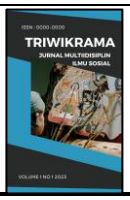
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Buku Saku Dana Desa Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edisi Keempat). California: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2021). Kebijakan Publik di Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*Corresponding author
E-mail addresses: firaamaghfiroh255@gmail.com



Rahayu, E., & Susanto, D. (2022). Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Desa. Jurnal Governance, 10(1), 15–29.

RBTV Disway. (2025). Dana Desa Kabupaten Situbondo 2025 Dianggarkan untuk 189 Desa dengan Total Dana Rp144 Miliar.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2020). Economic Development (Edisi ke-13). New York: Pearson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.